

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah di seluruh tanah air ialah perwujudan dari upaya bangsa dalam menjalankan strategi pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan trilogi pembangunan. Tiga landasan trilogi pembangunan meliputi stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya (Wikipedia, 2019). Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Todaro, 2013) Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik.

Indikator keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran suatu daerah.

Dalam satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 persen. Dimana secara keseluruhan angka tersebut telah melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017 sebesar 5,2 persen. Dari data tersebut, pulau Sumatera berkontribusi sebesar 5,42 persen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa terakhir yakni tahun 2008-2017 (BPS, 2019).

(Wikipedia, 2019) Sumatera ialah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas mencapai 473.481 km². Sumatera Utara berkontribusi sebesar 5,76 persen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa terakhir. Angka tersebut lebih besar dari yang ditargetkan pemerintah pada APBN-P dan juga melampaui hasil capaian yang dicapai oleh negara. Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam satu dasawarsa terakhir masih berada di peringkat kelima dari sepuluh provinsi yang ada di pulau Sumatera setelah Jambi sebesar 6,32 persen, Kepulauan Riau sebesar 5,87 persen, Bengkulu sebesar 5,81 persen, dan Sumatera Barat sebesar 5,78 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat mengenai belanja daerah pasal 31 ayat (1) menunjukkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2017) menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja tidak langsung sebesar Rp8.66 miliar. Sedangkan, anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp4.37 miliar. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada anggaran belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang seharusnya komposisi idealnya ialah anggaran belanja langsung yang sepatutnya lebih besar. Hal tersebut menjadikan masyarakat kurang dapat merasakan dampak dari APBD secara optimal.

Selain itu, permasalahan yang terjadi selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2015-2017 dapat dilihat pada perkembangan belanja langsung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung pada tahun 2015 sebesar Rp3.06 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Pada tahun 2016 belanja langsung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp2.89 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,18 persen. Namun, pada tahun 2017 belanja langsung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp4.37 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan menjadi sebesar 5,12 persen.

Dengan begitu hal tersebut berbanding terbalik dengan teori Haryanto (2013), yang menyatakan bahwa apabila belanja langsung meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitu sebaliknya. Fakta yang terjadi tidak sejalan dengan

teori tersebut. Padahal, belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 51,26 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sebesar -1,15 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Investasi merupakan salah satu faktor pendongkrak tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Investasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Dumairy dalam Rudibdo (2017) berpendapat bahwa dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah harus senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing. Menurut Husnan dalam Rudibdo (2017), proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek besar atau proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.

Pada umumnya, para ahli ekonomi sepakat bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Teori juga mengatakan bahwa kenaikan investasi dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Pangiuk, 2017).

Akan tetapi, hal yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada saat investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara (2015-2017) menunjukkan bahwa perkembangan investasi pada tahun 2015 sebesar Rp21.47 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Pada tahun 2016 investasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp.19.16 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,18 persen. Namun, pada tahun 2017 investasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp32.20 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan menjadi sebesar 5,12 persen.

Dengan begitu hal tersebut berbanding terbalik dengan teori Dwiningwarni (2009), yang menyatakan bahwa apabila investasi mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula, begitu sebaliknya. Fakta yang terjadi tidak sejalan dengan teori tersebut, Padahal, investasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 68,02 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sebesar -1,15 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mendalami penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Belanja Langsung dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah, adalah: “seberapa besarkah pengaruh belanja langsung dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1999-2017?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diketahui mengenai rumusan masalah dari penelitian, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1999-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1999-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi mewujudkan suatu daerah yang makmur dan sejahtera.

2. Bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh belanja langsung dan investasi terhadap pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Bagi pihak-pihak lain atau peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan atau referensi dalam melakukan atau melaksanakan penelitian yang sama di masa mendatang.